

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Strategi Rekrutmen Partai

2.1.1 Pengertian Strategi

Strategi Politik Menurut Peter Schorder dalam bukunya yang berjudul Strategi politik, merupakan tehnik yang digunakan untuk mewujudkan suatu cita-cita politik. Adanya strategi politik karena pemberlakuan peraturan baru, pembentukan suatu struktur baru dalam administrasi pemerintahan, atau dijalankannya program deregulasi, privatisasi atau desentralisasi. Namun banyak partai politik yang kurang merencanakan cukup matang langkah semacam itu.¹

Dalam abad modern dan globalisasi, penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni seorang panglima dalam peperangan, tetapi sudah digunakan secara luas termasuk dalam ilmu ekonomi maupunlah raga. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencaipan suatu tujuan.

Strategi politik juga dapat mendorong terjadinya perubahan sikap perilaku yang dilakukan secara sengaja yang kemudian memberikan warna dan perubahan pada pemerintahan. Strategi tersebut muncul karena desakan kebutuhan internal dan eksternal partai sebagai kelompok yang terorganisir dan merupakan dampak dari interaksi masyarakat. Adanya strategi politik menyebabkan suatu institusi

¹ Peter Schroder, Strategi Politik edisi revisi untuk pemilu 2009, (Jakarta: Frederich-Naumann-Stiftung fuer die Freiheit 2008),5

politik melakukan terobosan-terobosan politik dalam menjalankan aktivitas politik.

Menurut Prof Firmanzah strategi Partai dalam buku yang berjudul Marketing partai politik, bahwa strategi partai politik merupakan pendekatan dan komunikasi politik perlu dilakukan oleh para kontestan untuk dapat memenangkan pemilu. Para kontestan perlu melakukan kajian untuk mengidentifikasi besaran pendukungnya. Strategi ini perlu dipikirkan oleh setiap kontestan karena pesaing juga intens upaya untuk melakukan persaingan terhadap partai politik. Sementara itu carra masyarakat, menentukan pilihannya tergantung pada karakteristik terhadap partai yang bersangkutan.

Juga strategi penguatan angat di butuhkan dalam hubungan antara partai politik dengan kontestan mereka, hal ini dilakukan agar ikatan baik di antara mereka yang bersifat rasional maupun emosioanal tetap terjaga. Sangat diharapkan ²ikatan politik antara partai politik dengan kontestan menjadi semakin tinggi.

2.1.2. Bentuk Bentuk Strategi Partai

Dalam sebuah strategi tersimpan tujuan khusus, salah satunya adalah kemenangan. Sehingga untuk mencapai kemenangan tersebut dibutuhkan suatu metode perencanaan strategi. Dijelaskan bahwa terdapat empat perencanaan strategi ,yaitu:

²Firmanzah. 2008. *Marketing Politikantara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal 109-110

1. Pendekatan metodologis

kemiliteran, berorientasi pasar, politis. Dalam pendekatan initer dapat gambaran yang memiliki makna masing-masing ada perbedaan dan persamaan. Pendekatan tersebut saling berpotongantidak hanya karena dalam persamaan metodologinya, tetapi juga karena beberapa menjadi bagiandari strategi lainnya. Dengan demikian strategi militer dapat selalu menjadi bagian dari strategi politis, dan sebuah strategi politis juga selalu merupakan strategi pasar, atau setidaknya menunjukkan adanya orientasi pasar, yang perlu kita lihat pada saat kampanye pemilu adanya orientasi pasar, yang perlu kita lihat pada saat kampanye pemilu.

2. Model Kemeliteran

Untuk lebih menghargai penerapan strategi militeratas strategi lainnya, seseorang perlu memiliki beberapa pengetahuan dasar mengenai konsep dan prinsip perang. Menurut Wylie, tujuan awal seorang perencana strategi dalam perang adalah memiliki control atas musuhnya. Kontrol ini terjadi melalui suatu pola perang yang dimanipulasi dengan cara agar titik berat perang tersebut bergerak kearah yang menguntungkan si perencana strategi dan merugikan musuh. Titik berat perang menentukan hasil perang tersebut. Oleh karena itu, tujuan utama strategi adalah memindahkan titik berat perang bagi keuntungan pihak sendiri. Hal ini tergantung pada beberapa factor hakekat perang, tempat dan waktu perang, serta bobot titik berat.

3. Model Perencanaan Korporasi

Perencanaan korporasi merupakan analisis sistematis dan perumusan tujuan yang mengarah kedepan, yang mencakup cara dan pilihan-pilihan bersikap, pilihan optimal yang dimiliki dan penetapan instruksi-instruksi untuk merealisasikannya secara rasional.

4. Model Perencanaan Politis

Dalam proses perencanaan politis terdapat pola yang diutamakan yaitu: Perencanaan strategi melakukan upaya untuk memposisikan organisasi berdasarkan realita lingkungan operasionalnya.

Perencanaan konseptual memandang faktor lingkungan sebagai variabel, karena tujuan utama strategi politik adalah untuk mengubah lingkungan, masyarakat dan kerangka hukum. Untuk dapat menetapkan pilihan yang tepat, kita harus memiliki kemampuan untuk mengenali pola dasar strategi yang diperlukan. Ada beberapa jenis-jenis strategi Perencanaan konseptual memandang faktor lingkungan sebagai variabel, karena tujuan utama strategi politik adalah untuk mengubah lingkungan, masyarakat dan kerangka hukum. Untuk dapat menetapkan pilihan yang tepat, kita harus memiliki kemampuan untuk mengenali pola dasar strategi yang diperlukan.

Ada beberapa jenis-jenis strategi³

- Strategi Ofensif merupakan strategi memperluas pasar dan strategi menembus pasar. Dalam strategi ofensif yang digunakan untuk mengimplementasikan politik, yang harus dijual adalah perbedaan terhadap

³ Peter Schroder, Strategi Politik, (Jakarta: Frederich-Naumann-Stiftung fuer die Freiheit 2003), 26

keadaan yang berlaku saat itu serta keuntungan-keuntungan yang dapat diharapkan.

- strategi memperluas pasar dan strategi menembus pasar. Dalam strategi ofensif yang digunakan untuk mengimplementasikan politik, yang harus dijual adalah perbedaan terhadap keadaan yang berlaku saat itu serta keuntungan-keuntungan yang dapat diharapkan.

Strategi adalah seni untuk menjalankan suatu proses demi mencapai keberhasilan dan kemenangan. Strategi dapat dicapai melalui taktik. Namun, tanpa strategi taktik tidak ada gunanya. Banyak strategi partai politik untuk menciptakan kader pemimpin bangsa mulai dari rekrutmen sampai strategi pengorganisasian didalamnya. Namun dapat disimpulkan bahwa, strategi partai politik yang terpenting dalam menciptakan kader pemimpin bangsa adalah strategi dalam rekrutmen kadernya. Mengingat rekrutmen merupakan awal pencarian kualitas kader yang sesuai dengan keinginan partai politik tersebut yang akan berdampak pada baik buruknya pemimpin bangsa dari kader tersebut.

Partai memiliki kebebasan menentukan strategi rekrutmen apa yang akan di gunakan. Namun hal tersebut bukanlah hal yang mudah karena partai politik harus mempertimbangkan dengan matang guna mendapatkan kader partai politik dan kader pemimpin bangsa yang baik dan sesuai harapan warga negara.

Perekrutan kader pemimpin bangsa oleh partai menjadi strategi terpenting dalam menciptakan pemimpin bangsa yang akan terpilih nantinya. Perekrutan sebagai awal dari strategi penciptaan kader dimana partai politik memilih kadernya sesuai tujuan masing-masing partai politik.

Menurut Mochtar Mas'ood bahwa rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksi rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintah melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan ujian. Proses ini menentukan siapa sajakah yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik tersebut.

2.2 Rekrutmen Kader Partai

2.2.1 Pengertian Rekrutmen

Menurut Ramlan Surbakti pengertian rekrutmen politik adalah untuk seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Partai politik menyeleksi dan menempatkannya sebagai seorang calon pemimpin pada suatu masyarakat.

Rekrutmen merupakan suatu proses mencari, mengadakan, menemukan dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Definisi umum partai politik memiliki pengertian sebagai organisasi yang dibentuk untuk diperjuangkan suatu pandangan, keyakinan, dan cita-cita tertentu dari sejumlah orang tentang kehidupan bermasyarakat yang dilakukan dengan cara-cara perjuangan politik, yakni mengelola kekuasaan agar dapat mempengaruhi proses-proses pembentukan kebijakan publik⁴

⁴Ramlan Surbakti. 2003. *Tingkat Pelembagaan Partai Politik*. <https://www.kompas.com>. diakses 5 Januari 2023

Dalam Pandangan Partai Politik, mengenai Rekrutmen Menurut UU No. 2 Tahun 2011 atas perubahan UU No. 2 Tahun 2008 Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁵ Maka dari itu partai memiliki cara tersendiri dalam melakukan perekrutan terutama dalam pelaksanaan dan procedural perekrutan yang dilakukan partai politik tersebut. Tak hanya itu proses rekrutmen juga merupakan strategi mencari dan mengajak orang-orang yang memiliki kemampuan untuk turut aktif dalam kegiatan politik, yaitu dengan cara menempuh berbagai proses penjurangan.⁶

Partai membantu memberikan kesadaran pada masyarakat dan ikut berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan yang diperlukan agar sistem demokrasi dapat berfungsi dengan baik. (rakyat). Tanpa adanya dukungan dari masyarakat, partai politik tidak dapat dibentuk, oleh karena itu rekrutmen sangat penting dalam sebuah keberlanjutan suatu partai.

2.2.2 Sistem Rekrutmen

Menurut Ludwig Von Bertalanffy, sistem adalah sekumpulan unsur yang berada dalam keadaan berinteraksi dan menurut Gabriel Almond, sistem politik merupakan suatu sistem yang ditemui dalam masyarakat yang menjalankan fungsi

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

⁶Efriza. *Op. Cit.* Hal 213

integrasi dan adaptasi. Fungsi integrasi dijalankan oleh sistem politik untuk mencapai kesatuan dan persatuan dalam masyarakat yang bersangkutan sedangkan fungsi adaptasi merupakan fungsi pengesuaian terhadap lingkungan.⁷

Rekrutmen adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh partai politik untuk mencari sumber daya manusia (human Resources) guna dilibatkan dalam aktivitas partai politik, baik sebagai anggota, pengurus partai maupun untuk mengisi jabatan-jabatan politik. Rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Dari dua pengertian tersebut, ada dua dimensi dari rekrutmen. Pertama, dimensi internal, yakni bahwa rekrutmen menyangkut soal bagaimana partai mencukupi ketersediaan SDM guna keberlanjutan eksistensinya. Kedua, pada hakekatnya, partai politik lahir dan dikonstruksikan sebagai milik publik. Konsekuensinya, partai bertanggung jawab menyediakan ruang bagi publik luas untuk terlibat dalam aktivitas partai politik⁸

Eksistensi anggota penting bagi kehidupan partai politik dalam keberhasilan maupun kegagalan partai politik dalam menjalankan fungsinya, tergantung seberapa mampu partai politik menyediakan ruang bagi eksistensi anggotanya. secara umum, rekrutmen yang dilakukan partai politik, dibagi menjadi tiga jenis, yaitu rekrutmen anggota baru, rekrutmen anggota pengurus

⁷ Toni Andrianus Pito, dkk. (2013). Mengenal Teori-Teori Politik: Dari Sistem Politik Sampai Korupsi. Bandung: Nuansa Cendikia. Hal.43-46

⁸ Miriam Budiardjo. (2015). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. Hal. 162

partai dan rekrutmen jabatan-jabatan politisi atau publik. Dalam hal ini, proses rekrutmen membutuhkan eksisnya untuk persyaratan formal tertentu yang harus di penuhi oleh calon anggota dan calon pejabat publik ataupun politik tertentu. Prasyarat formal ini dibentuk dan diakui bersama oleh semua komponen dalam partai politik⁹

Menurut Miftah Thoha dalam buku kebijakan publik yang membumi mengatakan bahwa ada dua sistem yang digunakan dalam proses rekrutmen. Pertama, sistem patronik (patronage system), sistem ini di kenal dengan sistem kawan, karena dasar pemikirannya melalui proses rekrutmen berdasarkan kawan, ikatan kerabat dan keluarga. Sistem kawan ini juga berdasarkan perjuangan politik karena memiliki satu pemikiran yang sama. Kedua, sistem merit (merit system) sistem ini berdasarkan kecakapan seseorang untuk menduduki jabatan tertentu sehingga sistem ini lebih bersifat objektif karena atas dasar pertimbangan kecakapan.¹⁰

2.2.3 Fungsi Rekrutmen Partai Politik

Menurut Firmansyah, peran dan fungsi partai politik dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, peran dan tugas internal organisasi. Dalam hal ini organisasi partai politik memerankan peran penting dalam pembinaan, edukasi,

⁹ Suharlin. (2019). Analisis Sistem Rekrutmen Dan Kaderisasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hal. 16. Diakses Kamis 20 Oktober 2022 dari Universitas Baturaja.

¹⁰ Rudi Saputra. (2018). Rekrutmen Partai Politik (Studi Pola Rekrutmen Partai Solidaritas Indonesia Terhadap Anak Muda). Skripsi fakultas ilmu politik dan ilmu sosial UIN Syarif Hidayatullah. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44487>. Diakses pada hari Kamis 1 September 2022.

pembekalan, kaderisasi, dan melanggengkan ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik. Kedua, partai politik juga bersifat eksternal organisasi. Disini peran dan fungsi organisasi partai politik terkait dengan masyarakat luas, bangsa dan Negara.

Dwight King menyatakan peran utama partai politik terbagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. Memberikan jembatan institusional antara warga Negara dan pemerintah.
2. Menggodok dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang ditawarkan kepada Rakyat pemilih dan untuk dilaksanakan oleh pemerintah hasil pemilu.
3. Jalur bagi proses kaderisasi dan seleksi politisi untuk mengisi jabatan politik¹¹

Menurut UU No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, khususnya pasal 7 ayat 5 dimana salah satu fungsi utama partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender¹²

Selanjutnya, fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu fungsi rekrutmen sangat penting bagi kelangsungan system politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam. Rekrutmen memiliki keseragaman yang tiada terbatas, namun pada dasarnya ada dua cara khusus seleksi pemilihannya melalui kriteria universal dan kriteria partikularistik. Pemilihan dengan kriteria universal merupakan seleksi untuk memainkan peranan

¹¹Efriza.*Op.Cit.* Hal 226

¹² UU No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, khususnya pasal 7 ayat 5

dalam system politik berdasarkan kemampuan dan penampilan yang ditunjukkan lewat tes atau ujian dan prestasi. Sedangkan yang dimaksud dengan kriteria partikularistik adalah pemilihan yang bersifat primordial yang didasarkan pada suku, ras, keluarga, almamater atau factor fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan system politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup system politik akan terancam.

Pemilihan dengan kriteria universal merupakan seleksi untuk memainkan peranan dalam system politik berdasarkan kemampuan dan penampilan yang ditunjukkan lewat tes atau ujian dan prestasi.¹³

Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karenahanya dengan kader yang demikian dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengembang kan diri. Dengan mempunyai kader-kader partai yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional¹⁴.

2.2.4 Mekanisme Rekrutmen Partai

Teori Rekrutmen menurut Almond dan Powell (dalam J. Prihatmoko,) Rekrutmen Partai politik adalah suatu proses dimana terjadi penseleksian calon-

¹³ Hesel Nogi Tangkilisan, Kebijakan Publik yang Membumi, (Yogyakarta :Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2003). 188

¹⁴Budiardjo, Dasar-Dasar IlmuPolitik, 408

calon masyarakat yang dipilih untuk menempati kursi- kursi penting di dalam peranan politik, termasuk dalam jabatan birokrasi dan jabatan administrasi. Teori Almond dan Powell prosedur-prosedur rekrutmen terbagi dalam dua bagian yaitu:

1. ***Prosedur tertutup*** artinya rekrutmen dilakukan oleh elit partai yang memiliki kekuasaan untuk memilih siapa saja calon-calon yang dianggap layak diberikan jabatan berdasarkan skill dan kapasitas yang dimilikinya untuk memimpin, Sehingga prosedur ini dianggap prosedur tertutup.
2. ***Prosedur terbuka*** artinya setiap masyarakat berhak untuk memilih siapa saja yang bakal menjadi calon pemimpin di dalam negaranya serta pengumuman hasil pemenang dari kompetisi tersebut dilaksanakan secara terbuka, dan terang-terangan. Dikenal dengan istilah LUBER :***Langsung Umum Bebas dan Rahasia***, ***JURDIL*** : Jujur dan Adil dalam rekrutmen juga dikenal istilah jalur-jalur politik yang perlu kita ketahui secara luas kajian-kajiannya antara lain :

Jalur rekrutmen berdasarkan kaderisasi artinya setiap kelompok- kelompok partai harus menyeleksi dan mempersiapkan anggota- anggotanya yang dianggap mampu dan cakap dalam mendapatkan jabatan-jabatan politik yang lebih tinggi jenjangnya serta mampu membawa/memobilisasi partai-partai politiknya sehingga memberi pengaruh besar dikalangan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu tujuan dari terbentuknya suatu partai politik yang perlu kita ketahui. Seperti yang terangkum didalam teori Almond dan G.Bigham powell menjelaskan “rekrutmen tergantung pula terhadap proses penseleksian didalam partai politik

itu sendiri”. Jadi kesimpulanya setiap individu harus mempunyai skill yang mampu diperjual belikan sehingga mampu menempati jabatan-jabatan penting suatu negara. Jalur rekrutmen partai berdasarkan ikatan promodial, di zaman modern ini jalur rekrutmen promodial tidak menutup kemungkinan terjadi di dunia politik. Fenomena itu terjadi karena adanya hubungan kekerabatan yang dekat antara orang perorangan yang memiliki jabatan politik sehingga ia mampu memindah tangankan atau memberi jabatan tersebut kepada kerabat terdekatnya yang dianggap mampu dan cakap dalam mengemban tugas kenegaraan. Fenomena ini dikenal dengan nama “rekrutmen politik berdasarkan ikatan promodial.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan rekrutmen partai adalah:

A. Persoalan disekitar politik berarti setiap calon-calon pemimpin yang akan dipilih harus mampu mengoptimisasikan segala tenaga dan upayanya untuk menyeimbangkan segala polemik-polemik yang sedang terjadi di negara ini untuk dipersempit dampaknya. Sehingga iming-iming tersebut menjadi daya tarik bagi masyarakat luas untuk memilihnya sebagai calon pemimpin kedepannya.

A. Kekuasaan riil berarti seorang calon pemimpin harus memiliki teknik yang tersimpan di dalam konsep pikirannya untuk dikembangkan ketika telah menjadi pemimpin. Konsep tersebut berisi suatu cara bagaimana mempengaruhi masyarakat luas sehingga mampu dipercaya untuk memimpin dalam periode yang lama dan abadi. Unsur yang terakhir adalah berada dalam suatu historis artinya setiap pemimpin otomatis menginginkan nama dan jasa-jasanya selalu terekam dalam benak pikiran masyarakat dan setiap calon

pemimpin harus mampu merangkai konsep. Apabila kita mengkaji pola-pola tersebut maka kita akan mengetahui bahwa system nilai,perbedaan derajat.

2.4 Konsep Teori Kaderisasi

Kaderisasi merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh suatu organisasi, dengan adanya kaderisasi akan memunculkan suatu proses perputaran dan pergantian dari kader sebelumnya, dengan adanya kaderisasi yang baik akan memunculkan kader yang berkualitas dan mempunyai kemampuan dalam mengorganisir partai serta mempunyai kapabilitas dan mempunyai komitmen demi keberlanjutan organisasi di masa depannya untuk meneruskan cita-cita, visi, misi, serta tujuan dari organisasi tersebut

Secara terminologis, definisi kaderisasi adalah pencetakan, sedangkan definisi kader itu sendiri adalah orang-orang yang dipercaya mampu melanjutkan tugas-tugas yang ada dalam suatu organisasi dengan kata lain, kaderisasi adalah proses, cara, atau perbuatan dalam usaha mendidik manusia yang memiliki kompetensi tinggi yang mapan untuk menjalankan suatu amanah.

Kaderisasi merupakan usaha pembentukan seorang kader secara berkelanjutan, terstruktur dalam organisasi yang biasanya mengikuti silabus/kurikulum/manhaj tertentu. Kaderisasi secara harfiah memiliki definisi sebagai pendidikan jangka panjang untuk pengoptimalan potensipotensi yang ada di dalam jiwa kader dengan cara mentransfer dan menanamkan nilai-nilai tertentu, sehingga nantinya akan melahirkan dan menciptakan kader-kader yang

tanggung, bertanggung jawab dalam meneruskan estafet kepemimpinan dan tujuan organisasi.

Kaderisasi memiliki sifat sebagai suatu proses intervensi yang dilakukan oleh partai politik dengan tujuan meningkatkan kemampuan anggota kadernya agar dapat melaksanakan fungsi partai tersebut. Secara eksternal, kaderisasi merupakan tanggung jawab partai terhadap masyarakat untuk melaksanakan pendidikan politik terhadap rakyat. Kaderisasi berguna sebagai menyeleksi para anggota kader partai dalam proses rekrutmen agar mendapatkan kader yang memiliki sifat loyalitas dan berkompeten.

Jika di kaitkan konsep tersebut dengan kaderisasi yang di lakukan PKS terhadap kader kadernya, PKS mampum encetak kader kader yang loyal kepada PKS. Pasalnya kader kader PKS sudah di didik oleh partai dengan kuri kulum yang di terbikan oleh PKS sendiri. Setelah menjadi kader inti di partai, kader kader tersebut memegang amanah dari partai dan amanah tersebut tidak boleh ditingkari.

Suatu kader bisa di keluarkan dari partai apabila suatu kader melanggar peraturan, perjanjian, dan amanah yang sudah di berikan partaik pada kader tersebut. Kader kader ini pun akan melanjutkan tujuan dan memegang tongkat estafet untuk memperjuangkan perjuangan PKS di kanca perpolitikan

Indonesia.¹⁵akan melanjutkan tujuan dan memegang tongkat estafet untuk memperjuangkan perjuangan PKS di kanca perpolitikan Indonesia.

2.4.1 Pengertian Kaderisasi

Istilah kaderisasi berasal dari kata “kader”, kader pada mulanya berasal dari istilah militer atau perjuangan yang berasal dari kata *carde* yang didefinisikan sebagai pembinaan yang tetap sebuah pasukan inti yang sewaktu-waktu diperlukan.¹⁶Kaderisasi merupakan hal penting bagi sebuah organisasi, karena merupakan inti dari kelanjutan perjuangan organisasi kedepan. Tanpa kaderisasi, rasanya sangat sulit dibayangkan sebuah organisasi dapat bergerak dan melakukan tugas-tugas keorganisasiannya dengan baik dan dinamis. Kaderisasi adalah sebuah keniscayaan mutlak membangun struktur kerja yang mandiri dan berkelanjutan. Fungsi dari kaderisasi adalah mempersiapkan calon-calon (*embrio*) yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan sebuah organisasi. Kader suatu organisasi adalah orang yang telah dilatih dan dipersiapkan dengan berbagai keterampilan dan disiplin ilmu, sehingga dia memiliki kemampuan yang di atas rata-rata orang umum. Bung Hatta pernah menyatakan kaderisasi dalam kerangka kebangsaan, yaitu; bahwa kaderisasi sama artinya dengan menanam bibit.

¹⁵Pandu Wibowo. *Sistem Rekrutmen dan Kaderisasi PKS*.<https://pemikiran-pandu-wibowo.blogspot.com/2013/01/kata-pengantar-bahan-penulisan-ilmiah.html>, diakses 22 Oktober 2021

¹⁶Sarana Ilmu. *Kaderisasi-pengertian dan penjelasannya secara lengkap*.<https://www.weschool.id/arti-kaderisasi-secara-lengkap/>.Diakses 23 Oktober 2021.

Untuk menghasilkan pemimpin bangsa di masa depan, pemimpin pada masanya harus menanam¹⁷

2.4.2 Sistem Kaderisasi

Untuk memudahkan mengetahui adanya kaderisasi atau tidak dalam sebuah partai, ada beberapa hal yang dapat digunakan sebagai indikator. Pertama, adanya kurikulum atau silabus kaderisasi. Kedua, adanya divisi yang menjadi penanggung jawab atau penyelenggara kaderisasi. Ketiga, ada rentang waktu yang jelas untuk masing-masing level penjurangan kaderisasi. Keempat, *output* dari rentang kaderisasi berupa capaian yang disasar dari masing-masing level kaderisasi.¹⁸ Sistem kaderisasi harus di sertai dengan sistem yang transparan untuk memberikan jaminan kesetaraan kepada semua kader yang memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh. Selain itu, perlu juga memunculkan system persaingan yang sehat dan transparan dalam tubuh organisasi politik. Setiap kader dan calon pemimpin harus dibiasakan dengan system persaingan yang sehat dan transparanitu. Karena, dengan system persaingan yang terbebas dari kolusi dan nepotisme inilah kaderisasi akan dapat melahirkan calon-calon pemimpin yang berintegritas.¹⁹ Sistem kaderisasi harus disertai dengan sistem yang transparan

¹⁷Moh. Arif Nugraha. 2019. *Pengaruh Kaderisasi dan Kader Angkatan Muda Partai Golkar Terhadap Elektabilitas Partai Golkar (Studi Deskriptif Terhadap Angkatan Muda Partai Golkar di Kabupaten Bandung Barat)*. Skripsi FKIP Unpas. Diakses 24 Oktober 2021

¹⁸Syamsuddin Haris, dkk. *Panduan Rekrutmen & kaderisasi partai politik ideal*. (Jakarta: Direktorat pendidikan dan pelayanan masyarakat kedepitan pencegahan, KPK bekerjasama dengan P2Politik LIPI, 2016). Hal 50.

¹⁹Firmanzah. 2008. *Marketing Politik an tara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal 70-71

untuk memberikan jaminan kesetaraan kepada semua kader yang memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh. Selain itu, perlu juga memunculkan sistem persaingan yang sehat dan transparan dalam tubuh organisasi politik. Setiap kader dan calon pemimpin harus dibiasakan dengan sistem persaingan yang sehat dan transparan itu. Karena, dengan sistem persaingan yang terbebas dari kolusi dan nepotisme inilah kaderisasi akan dapat melahirkan calon-calon pemimpin yang berintegritas. Dalam proses kaderisasi, terdapat dua macam prosesnya, yaitu: kaderisasi informal dan kaderisasi formal. Dalam kaderisasi informal, proses yang dilakukan dapat dilihat dari proses kehidupan di lingkungan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari masa remaja hingga dewasa sebagai proses pembentukan jati diri, sehingga memiliki keunggulan dan mampu bersaing dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat.

2.4.3 Pengertian Sayap Partai

Sebagaimana dituliskan sebelumnya, bahwa eksistensi OSP telah mendapat legitimasi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya dapat ditemukan dalam Pasal 12 (j) UU Parpol. Pengakuan tersebut memberikan peluang bagi Parpol untuk mengembangkan infrastruktur politiknya. Peluang tersebut hendaknya juga harus dijawab oleh OSP dengan membuktikan diri bahwa mereka bukanlah sekedar pelengkap struktur organisasi partai semata.²⁰

OSP dapat berupa organisasi pemuda, organisasi perempuan, organisasi buruh, organisasi tani, organisasi profesi, dan kelompok-kelompok rakyat.

²⁰Moh. Nizar Zahro, Urgensi Peran Satria Bagi Partai Gerindra, <https://www.jpnn.com/news/urgensi-peran-satria-bagi-partai-gerindra>, diakses pada tanggal 28 Maret 2019

Keberadaan OSP politik tersebut merupakan sumber daya-sumber daya yang harus dibina, dikembangkan dan diberdayakan oleh Parpol. Hal inikarena, OSP tersebut merupakan instrument penting untuk menarik simpati dan dukungan yang sebesar besarnya dari segenap lapisan masyarakat yang pada akhirnya tentu akan mampu memenangkan partai dalam kompetisi politik (Pemilu) secara elegan dan bermartabat²¹.

Sebagaimana disebut dalam Pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bahwa salah satu hak Partai adalah membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai. Didalam penjelasan disebutkan bahwa “Organisasi sayap Partai merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap Partai Politik sesuai AD dan ART masing-masing Partai Politik”. Dari penjelasan UU. Nomor 2 Tahun 2008 tampak bahwa pembentukan organisasi sayap partai politik itu yaitu. Organisasi sayap partai politik dibentuk secara langsung oleh partai politik Ormas ini masuk menjadi organisasi sayap partai ada yang secara menetap karena merasa seide dan/atau sepaham dengan visi/misi partai politik. Tetapi, ada juga yang sesuai kebutuhan, misalnya, ormas tersebut menjadi organisasi sayap partai politik pada saat Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Legislatif dan sebagainya, setelah itu mereka jalan masing masing. Memperhatikan keberadaan organisasisayap partai politik sebagaimana disebutkan di atas, yang menjadi pertanyaan adalah untuk apa organisasi sayap partai ini dibentuk. Pertanyaan ini

²¹Di kutip dari, Dzihnaton Nabilah, Peran Organisasi Sayap Tidar (Tunas Indonesia Raya) dalam Perluasan Basis Massa Partai Gerindra di Jawa Tengah, Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 2015

muncul, Sebab dalam UU Nomor. 2 Tahun 2008 tidak dijelaskan secara tegas apa fungsi serta bagaimana hubungan organisasi sayap partai politik dengan partai politik. Dalam penjelasan hanya disebutkan “organisasi sayap partai politik dibentuk sesuai anggaran dasar partai politik”. Artinya, kebijakan tentang apa yang menjadi fungsi dan bagaimana hubungan organisasi sayap partai dengan partai politik ditentukan oleh partai itu sendiri.

2.4.4 Fungsi Organisasi Sayap Partai

Berdasarkan pengertian ini, partai politik itu merupakan kumpulan orang yang dijadikan sebagai tempat (wadah) untuk melakukan aktivitas dalam memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan negara²². Dalam sebuah demokrasi, partai mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis. Hal itu sesuai dengan pendapat Jimly Asshiddiqie yang mengatakan bahwa partai merupakan pilar demokrasi, karena mereka memainkan peran penting dan strategis dalam menghubungkan pemerintah dengan warga negaranya. Berdasarkan peran partai sebagai mana dikemukakan di atas, partai itu perlu dan penting diperkuat derajat pelembagaannya dalam setiap system yang demokratis.

Hal itu sesuai dengan pendapat Muhammad Ridha T.R yang merujuk pada pendapat Minwaring dan Scully yang mengatakan bahwa pelembagaan partai merujuk pada empat dimensi system institusionalisasi partai, yakni: Pertama,

²²Marojahan JS Panjaitan, Politik, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi Dalam Bingkai Negara Kesejahteraan dan Kebahagiaan Menurut UUD 1945, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2018

stabilitas kompetisi. Kompetisi partai yang tidak disertai institusionalisasi akan mempertinggi angka volatility dalam pemilu.

Kedua, kedalaman akar partai dalam masyarakat. Partai memiliki wilayah pendukung utama yang tidak berubah setiap pemilu dan mempunyai struktur yang mengikat. Akar partai dalam masyarakat ditentukan oleh program dan struktur yang jelas dan dapat diterima masyarakat. ²³Menyangkut hubungan antara partai dan pemilihnya. Lemahnya hubungan struktur antara partai dan pemilih menjadi salah satu komponen yang memperlemah pengakaran partai di masyarakat. Ketiga, adanya legitimasi aktor terhadap partai partai. Kompetisi partai yang tidak disertai institusionalisasi akan mempertinggi angka volatility dalam pemilu. Kedua, kedalaman akar partai dalam masyarakat.

Partai memiliki wilayah pendukung utama yang tidak berubah setiap pemilu dan mempunyai struktur yang mengikat. ²⁴Menyangkut hubungan antara partai dan pemilihnya. Lemahnya hubungan struktur antara partai dan pemilih menjadi salah satu komponen yang memperlemah pengakaran partai di masyarakat.

²³Jimly Asshidiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007

2.4.5 Hubungan Organisasi Sayap Partai Dengan Partai Politik

Perkembangan ilmu dan teknologi yang begitu pesat, menyebabkan komunikasi manusia begitu dekat. Dapat dikatakan tidak ada lagi tirai pemisah manusia di seantero bumi ini. Berbagai kejadian diberbagai belahan dunia dengan mudah diakses melalui saluran media komunikasi. Hal tersebut juga berpengaruh pada dunia politik. Dalam dunia politik, telah terjadi pergeseran yang sangat signifikan, terlebih yang berkaitan dengan hubungan antara kontestan politik dan konstituen, khususnya ikatan antara partai politik dengan saat ini. Memandang partai politik itu tidak terlalu terikat dengan ideologi yang dianut oleh sebuah partai politik. Publik memandang partai politik itu lebih mengarah kepada apa yang menjadi konsep dan gagasan sebuah partai politik dalam membangun kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.

Menurut Syarifuddin Jurdi lebih lanjut bahwa dalam kerangka demokratisasi bangsa itulah berkembang berbagai aliran-aliran politik yang sebagian termanifestasikan dalam bentuk kekuatan politik. Dalam hal ini, kekuatan politik tidak hanya berpusat pada partai-partai politik, tetapi juga lebih luas dalam arti kelompok-kelompok kepentingan pun dapat dimasukkan dalam kategori kekuatan politik termasuk di dalamnya gerakan dan organisasi kemasyarakatan. Penguatan partai politik haruslah dilakukan baik secara internal dan eksternal partai. Penguatan secara internal dapat dilakukan melalui konsolidasi internal partai, penguatan proses pengkaderan dan penguatan struktur partai.

Pada eksternal partai dapat dilakukan dengan melakukan ekspansi terhadap penguatan mesin politik partai melalui organisasi sayap atau sering disebut dengan underbow partai politik. Organisasi sayap ini nantinya dapat dijadikan.²⁵

Jembatan suatu partai politik untuk menjangkau seluruh golongan masyarakat baik itu pemuda, buruh, perempuan maupun petani yang notabene merupakan sumber massa keberadaan organisasi sayap diharapkan dapat berperan aktif dalam membina, mengembangkan dan memberdayakan komunitas masing-masing masyarakat sesuai dengan ranah, kebutuhan dan masalah yang di hadapinya. Seperti halnya organisasi pemuda harus mampu memetakan potensi, kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh komunitas pemuda serta merumuskan solusi dan langkah-langkah yang efektif, terutama yang berkaitan dengan upaya kemenangan pemilu, mengingat kelompok pemilih muda merupakan lumbung suara yang patut untuk di perhatikan oleh partai politik dalam memenangkan pemilu maupun pilkada di setiap daerah.

Berkaitan dengan penguatan partai politik dengan organisasi sayap nya tersebut, pada masa pasca-kemerdekaan beberapa partai politik sudah memiliki basis massa yang dimobilisasi lewat pembentukan organisasi pendukung yang meliputi semua sector. Pada masa sekarang keberadaan organisasi sayap partai politik ini juga sangat diperlukan dalam kerangka penguatan basis partai politik. Organisasi sayap partai politik ini menjadi sumber penting dalam melakukan rekrutmen dan kaderisasi partai politik. Melalui sayap partai, internalisasi partai

²⁵Syarifuddin Jurdi, *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia: Konstelasi Ideologi dan Kepentingan*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2016, hlm. xvi

politik dan pembangunan karakter militansi dapat lebih mudah dilakukan dibandingkan sumber kaderisasi yang berasal dari organisasi masyarakat lainnya. Sebab, organisasi sayap merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sebuah partai politik. Organisasi sayap partai memberikan andil besar bagi partai politik baik dalam upaya implementasi, sosialisasi maupun deseminasi program dan kebijakan partai. Organisasi sayap partai dapat berbentuk organisasi pemuda, organisasi mahasiswa, organisasi perempuan, organisasi profesi, serta organisasi keagamaan. Oleh karena itu, hubungan antara organisasi sayap partai dengan partai politik sebagai basis untuk menciptakan kader partai politik perlu diperkuat.²⁶

Sebagaimana telah di kemukakan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut arti sayap partai.

1. Fungsi organisasi sayap partai tidak hanya sekedar penggalangan masa dalam memenangkan pemilihan umum. Lebih dari itu, organisasi sayap partai ini menjadi wadah untuk melakukan rekrutmen dan pengkaderan partai. Oleh karena itu, organisasi sayap partai politik ini menjadi sumber penting dalam melakukan pengkaderan internal partai.
2. Hubungan organisasi sayap partai dengan partai politik sangatlah erat. Organisasi sayap ini menjadi jembatan partai politik dalam menjangkau seluruh golongan masyarakat baik itu pemuda, buruh, perempuan maupun petani yang notabene merupakan sumber massa. Organisasi sayap partai politik berperan aktif dalam membina,

²⁶Syamsuddin Haris et al, op.cit., hlm. 54. Di akses pada tanggal 16 januari 2023

mengembangkan dan memberdayakan komunitas masing-masing masyarakat sesuai dengan ranah, kebutuhan dan masalah yang dihadapinya. Seperti halnya organisasi pemuda harus mampu memetakan potensi, kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh komunitas pemuda serta merumuskan solusi dan langkah-langkah yang efektif, terutama yang berkaitan dengan upaya pemenangan pemilu, mengingat kelompok pemilan muda merupakan lumbung suara yang patut untuk di perhatikan oleh partai politik dalam memenangkan pemilu maupun pilkada di setiap daerah.

2.4.6 Pengaturan organisasi sayap dalam sistem hukum di Indonesia dan pengaturan internal partai

Secara konstitusional, organisasi sayap partai menyadarkan pada basis Pasal 28 UUD NKRI, yaitu dalam rangka kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Artinya hal ini adalah bagian dari dianutnya kedaulatan rakyat dan demokrasi.

Saat ini, pengaturan hukum mengenai organisasi sayap politik dipandang berbeda dengan organisasi masyarakat pada umumnya yang berada diranah UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat. Organisasi sayap politik dikarakteristikkan berbeda dengan organisasi masyarakat lain yang keberadaannya diatur dalam UU Ormas karena organisasi sayap partai mempunyai kegiatan yang diperkecualikan dalam Pasal 52, yaitu larangan untuk melakukan kegiatan politik dan kegiatan menggalang dana dari masyarakat Indonesia. Sebagaimana

diuraikan, organisasi sayap partai sebagai organisasi komplementer partai politik bertujuan untuk mendukung fungsi dan kegiatan partai politik sehingga dalam konteksnya organisasi masyarakat aktivitas utamanya akan dominan bersinggungan dengan aktivitas politik termasuk kegiatan penggalangan dana dari masyarakat untuk tujuan kampanye politik, mendukung pencalonan oleh partai politik dan sejenisnya. Dalam penjelasan Pasal 12 huruf J UU Partai Politik menyebutkan bahwa organisasi sayap partai politik pendiriannya dapat dibentuk secara langsung atau menyatakan diri sebagai sayap partai politik. Pendirian organisasi sayap partai politik tersebut harus disebutkan dalam AD/ART masing-masing partai politik. Sehingga menurut ketentuan ini, organisasi sayap partai politik merupakan organisasi yang melekat pada partai politik. Sehingga karakter keorganisasiannya tidak sama dengan karakter keorganisasian, organisasi yang diatur dalam UU Ormas. Pengaturan yang demikian adalah relevan mengingat keberadaan organisasi sayap partai politik adalah dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan partai politik dalam aktivitas politik dan aktivitas-aktivitas lainnya.

Sebagaimana organisasi, maka organisasi sayap partai politik seharusnya berbentuk badan hukum. Hal ini untuk mempermudah pertanggungjawaban hukum aktivitas politik dan aktivitas organisasi lainnya. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban hukum diperlukan karena organisasi sayap partai politik mempunyai aktivitas penting dalam hal mendukung penggalangan dana partai politik dan aktivitas-aktivitas politik lainnya.

Pengaturan organisasi sayap di internal partai politik biasanya dicantumkan dalam AD/ART Partai politik. Beberapa partai politik besar telah mengatur detail organisasi sayap partai dalam AD/ART nya. Tetapi, pengaturan tersebut masih relative berdasarkan selera dan kebijakan internal partai. Beberapa partai belum mengatur organisasi sayap partai dan belum menyebutkannya dalam AD/ART.

Dalam Partai PKS sendiri ada beberapa, organisasi sayap partai yang di bentuk untuk membantu dan menunjang rekrtumen kader bagi PKS sendiri diantaranya.

1. PKS Muda
2. Garuda Keadilan
3. Gema Keadilan

2.5 Kerangka Pikir

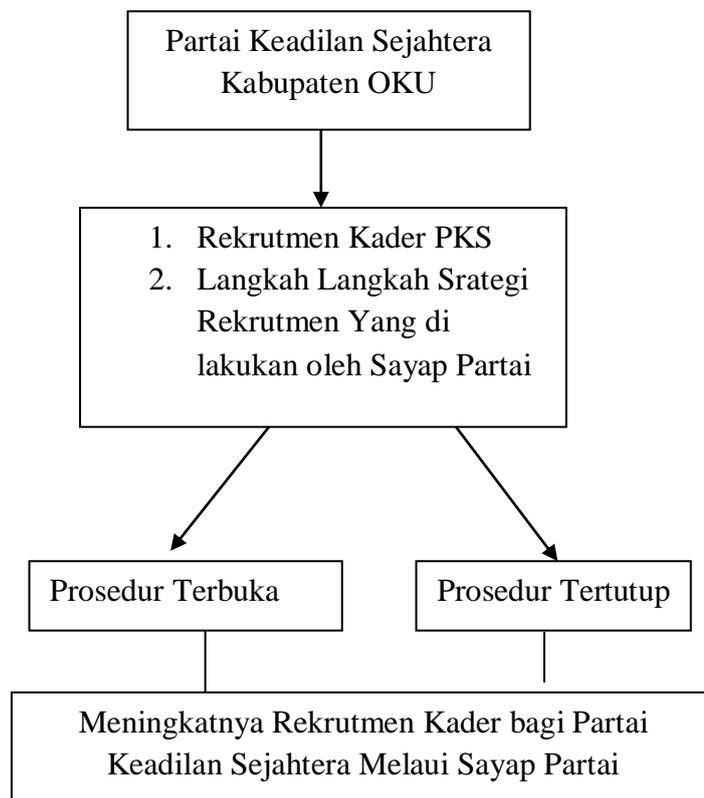
Uma sekaran dalam bukunya *Business Research* mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting dalam Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara rinci teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu di jelaskan hubungan antar variable independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada *variable moderator dan intervening*, maka juga perlu dijelaskan, mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan kedalam bentuk penelitian. Oleh karena itu pada setiap penyusunan penelitian harus di dasarkan pada kerangka berpikir²⁷. Rekrutmen dalam sebuah partai merupakan salah satu tujuan penting yang harus di lakukan oleh partai politik, Perekrutan kader partai politik menjadi strategi terpenting dalam menciptakan pemimpin bangsa yang akan terpilih nantinya. Perekrutan sebagai awal dari strategi penciptaan kader dimana partai politik memilih kader nya sesuai tujuan masing-masing dari partai politik, partai membutuhkan kader-kader partai yang berkualitas agar dapat menjalankan partai, sehingga partai harus melakukan rekrutmen politik. Ada dua macam mekanisme rekrutmen politik, yaitu rekrutmen yang terbuka dan tertutup.

Dalam model rekrutmen terbuka, semua warga yang memenuhi syarat tertentu mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki posisi-posisi yang ada dalam lembaga Negara / pemerintah. Sebaliknya, dalam system rekrutmen tertutup, kesempatan tersebut hanyalah dinikmati oleh sekelompok kecil orang.

²⁷Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hal 60

PKS merupakan salah satu partai yang dalam merekrut anggotanya secara sistematis dan metodik. Dalam strategi, ini untuk memudahkan merekrut kader PKS. Ada beberapa hal yang digunakan indikator, oleh karena itu kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

Bagan Kerangka Pikir



Teori Menurut Powwel Dan Kawan kawan

